



## **RILIS**

### **KUNJUNGAN KERJA (KUNKER) RESES KOMISI X DPR RI KE PROVINSI PAPUA RESES MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2024—2025 TANGGAL 6—10 DESEMBER 2024**

Kunker Reses Komisi X DPR RI ke Provinsi Papua pada Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024—2025 tanggal 6—10 Desember 2024 dipimpin oleh Ketua Komisi X DPR RI Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP. Kunker dilaksanakan untuk menyerap aspirasi Pemerintah Provinsi Papua, para pemangku kepentingan bidang pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga, literasi, riset dan data statistik daerah di Provinsi Papua, melihat secara langsung pelaksanaan UU pada bidang-bidang tersebut dan pelaksanaan berbagai program dan kebijakan pemerintah pusat di daerah.

Kunker diterima oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua L. Christian Sohila, S.T., M.Si, bersama para pelaku pendidikan di Provinsi Papua. Kunker diawali dengan peninjauan lapangan ke SMA Negeri 2 Jayapura. Pada kunjungan tersebut, Kepala Sekolah Yan Ayomi, SPd. mengatakan antara lain bahwa sekolah tersebut memiliki 63 guru yang melayani 1.511 siswa (723 putra daerah dan 788 siswa non-papua). Dengan jumlah siswa yang besar, salah satu kekurangan sarpras sekolah adalah kecilnya halaman sekolah sehingga tidak maksimal dalam kegiatan luar kelas. SMAN 2 Jayapura membutuhkan bis sekolah agar aktivitas siswa yang tinggal di luar kota, atau jauh dari sekolah, dapat terlayani oleh bis sekolah tersebut.

Pada pertemuan dengan pemangku kepentingan Dikdasmen, bidang literasi, pimpinan beberapa PTS dan PTN, KNPI, BPS Papua, dan lain-lain di kantor gubernur yang dipimpin oleh Pj. Gubernur Mayjen TNI (Purn) Ramses Limbong, S.IP., M.Si., permasalahan yang mengemuka yaitu adanya ketidakadilan antara pendidikan negeri dan swasta dalam berbagai aspek; kendala pengelolaan sarpras olahraga pasca PON terkesan tidak optimal pemeliharannya; kondisi perpustakaan masih minim baik dari bahan bacaan maupun dari kondisi bangunan gedung dan minimnya tenaga perpustakaan; pelaksanaan riset dan inovasi dinilai masih kurang; dan beberapa kendala lain. Salah satu usulan yang mengemuka yaitu agar Pemerintah Pusat maupun Daerah lebih fokus memperhatikan anak-anak yang bersekolah dan tinggal di Papua daripada mendatangkan transmigran. Diharapkan, mereka dimaksimalkan untuk membangun daerah dengan “transmigrasi di kampung sendiri”. Selain itu, diusulkan agar ada revisi PP Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua. Revisi diinginkan antara lain agar pengelolaan pendidikan menengah (SMA dan SMK) dilaksanakan pada tingkat provinsi bukan pada tingkat kabupaten/kota.

Secara umum Komisi X DPR RI mengapresiasi berbagai masukan dan aspirasi, namun Komisi X DPR RI melalui Bonnie Triyana (FPDIP/Dapil Banten) mendorong agar pemangku kepentingan di Provinsi Papua tidak terjebak dan hanya fokus pada masalah-masalah teknis, namun perlu lebih melihat potensi Papua sebagai beranda depan Indonesia di wilayah Pasifik. Papua memiliki potensi yang besar untuk menjadi lebih maju jika mampu memanfaatkan potensi dan memaksimalkan dukungan papua sebagai daerah khusus (otonomi khusus).

**Jayapura, 10 Desember 2024**

**Tim Kunker Reses Komisi X DPR RI ke Provinsi Papua.**